

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa. Dimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkadang malah membuat hidup masyarakat makin terasa sulit dari segi ekonomi khususnya, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kelompok masyarakat hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, mereka menjadi terpinggirkan, bahkan terabaikan. Penyebab kemiskinan dapat ditemukan pada berbagai jenjang. Ada penyebab yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri, seperti tingkat pendidikan yang rendah atau lemahnya wawasan dalam membelanjakan pendapatan tunai. Penyebab lainnya lebih merupakan tanggung jawab jenjang yang lebih tinggi (pemerintah), seperti kurang memadainya anggaran kesehatan dan pendidikan, atau kurangnya pengakuan terhadap kepemilikan lahan tradisional dan hak terhadap sumber daya alam (Cristian Gonner, 2007).

Dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan lembaga-lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga-lembaga masyarakat desa terdiri atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah, dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah, dan desa). Sedangkan lembaga nonformal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau kelompok

warga tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan. Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah bukan dimaksudkan untuk mengganggu atau memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, program senantiasa dilakukan dengan pengorganisasian yang matang (Zubaedi, 2013, hal. 83). Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan dilakukan, seperti pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya.

Kemiskinan memang tidak akan dapat dihilangkan namun hanya dapat dikurangi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan yang disebut sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pada tanggal 30 April 2007, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional yang terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Namun setelah berakhirnya masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka program PNPM Mandiri Pedesaanpun diberhentikan. Meskipun program PNPM nya sudah berhenti tetapi di sebagian desa program tersebut tetap berjalan tetapi namanya telah diubah, sebagian ada yang dilimpahkan kepada kecamatan dan diolah oleh kelembagaan BKAD, ada juga yang diberi nama UPK Mandiri Sejahtera dan ada juga dikelola oleh BUMDES. Dalam penulisan ini yang akan penulis bahas yaitu

khusus mengenai keberlanjutan yang dikelola oleh kelembagaan BKAD Mandiri di kecamatan Palipi.

BKAD Merupakan sebuah badan kerjasama antar desa yang dibentuk untuk mengelola kegiatan/pembangunan antar wilayah desa (Bisa antar desa-desa dalam wilayah satu kecamatan antar wilayah beberapa kecamatan). BKAD dalam konteks PNPM Mandiri pedesaan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di suatu wilayah kecamatan. Akan tetapi dari segi dasar, prinsip dan programnya masih menggunakan peraturan PNPM Mandiri. Program BKAD Mandiri pada prinsipnya adalah meningkatkan kesejahteraan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin.

Sehubungan dengan hal tersebut, BKAD Mandiri mempunyai program simpan pinjam salah satunya yaitu Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). SPP mempunyai suku bunga yang rendah serta tanpa jaminan yang menyulitkan masyarakat. Dengan suku bunga yang lebih rendah dari pada bank, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Program tersebut dapat membantu masyarakat menanggulangi pengangguran atau membentuk usaha kecil. Banyak masyarakat di kecamatan Palipi yang berdagang kecil-kecilan terlebih kaum perempuan atau ibu-ibu. Berdagang dilakukan guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat melalui keberlanjutan program tersebut yaitu di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dimana pada Program keberlanjutan PNPM yang saat ini telah diganti dengan BKAD Mandiri.

1.2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian ini pada kegiatan simpan pinjam BKAD Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kelembagaan BKAD Mandiri khususnya pada simpan pinjam di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya UPK dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kelembagaan BKAD Mandiri khususnya kegiatan simpan pinjam di kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki suatu manfaat maka dari itu adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi mahasiswa, untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui BKAD Mandiri.
2. Sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui BKAD-Mandiri.